

BAB III

HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR

Meskipun secara dampak positif Al Jazeera telah memberikan banyak kepada publik Arab, kontroversi pasti akan selalu ada terhadap Al Jazeera. Kritik pasti muncul dari rezim negara-negara di Timur Tengah yang tidak sepakat dengan ide liberalisasi atau ilai demokrasi yang dibawakan oleh Al Jazeera. Terkait kontroversi Al Jazeera di antara rezim negara-negara Timur Tengah tersebut, konflik dua negara yang berkaitan dengan Al Jazeera dan paling menonjol ialah konflik antara Arab Saudi dan Qatar. Pada bab ini, penulis akan mengulas lebih banyak mengenai hubungan antara kedua negara tersebut dari awal hubungan keduanya hingga tahun 2017 yang merenggang, salah satunya karena Al Jazeera.

A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Arab Saudi-Qatar

Arab Saudi dan Qatar merupakan dua negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Keduanya ialah negara penganut agama Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi keseharian. Baik Qatar maupun Arab Saudi keduanya ialah negara yang menganut sistem monarki dan masih kental unsur dinasti. Secara ukuran wilayah, Arab Saudi jelas jauh lebih besar ketimbang Qatar. Jumlah penduduk pun lebih banyak Arab Saudi ketimbang Qatar, dengan Arab Saudi 32 milyar dan Qatar 2.7 milyar. Bukan hanya soal luas wilayah dan jumlah penduduk saja yang berbeda, perbedaan esensial yang tampak di antara keduanya ialah Qatar merupakan negara yang lebih progresif terhadap perubahan sedangkan Arab Saudi lebih tradisional dan konservatif, yang pada momennya menjadi alasan kedua negara ini memiliki hubungan yang renggang.

Secara histori, Qatar selalu jauh lebih lemah dari tetangganya. Sehingga untuk menyasati hal ini Qatar menggunakan strategi yaitu bersekutu dengan kekuatan besar. Hal ini dibuktikan ketika Qatar berada di bawah kontrol kolonial Inggris. Namun setelah penarikan Inggris dari Qatar pada tahun 1971 dari Timur Suez, kebijakan luar negeri Qatar mulai bergantung pada Arab Saudi. Dalam hal ini Qatar menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan Arab Saudi dan Qatar banyak mencari bimbingan kepada Arab Saudi. Arab Saudi, secara *de facto*, telah menjadi pelindung Qatar. Hubungan ketergantungan ini berubah saat memasuki periode 1990-an awal. Terutama ketika Sheikh Emir Khalifa bin Hamad Al Thani, yang masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1972 hingga 1995, menyerahkan jalannya urusan sehari-hari negara kepada putra tertuanya yaitu Putra Mahkota Hamad bin Khalifa Al Thani pada tahun 1992. Pada tahun 1995 putra mahkota Qatar ini kemudian mengkuadeta, tanpa perlawanan, ayahnya sehingga ia naik menjadi emir Qatar. Putra mahkota yang kemudian disebut Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al Thani ini merupakan individu yang memiliki pandangan sangat berbeda dari ayahnya tentang masa depan Qatar. Beliau bahkan berusaha untuk menentang kekuasaan Arab Saudi atas negaranya (Cherkaoui, 2014).

Hubungan antara Qatar dan Arab Saudi merenggang sebenarnya dikarenakan Qatar mengubah arah kebijakan luar negerinya untuk lepas dari bayang-bayang Arab Saudi. Bahkan hal ini bisa dikatakan telah mulai sebelum Putra Mahkota Hamad bin Khalifa Al Thani yang memiliki pemikiran progresif itu menjabat sebagai emir. Tahun 1988, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani telah menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, musuh dari Arab Saudi. Hal tersebut memberi Qatar rasa kebijakan luar negeri yang independen (Fisher, 2017).

Sebagai bukti berikutnya yaitu ketika Irak, dalam pimpinan Saddam Hussein, menyerbu Kuwait pada tahun 1990 dan mengancam Arab Saudi, ketika itu Arab Saudi sulit untuk mempertahankan perbatasannya terlebih terhadap negara-negara satelit kecil yang berada dalam pengaruhnya. Pada titik ini, pimpinan Qatar mengambil keputusan penting secara strategis dengan menandatangani perjanjian militer dengan Amerika Serikat, yang memungkinkan militer AS menggunakan Qatar sebagai pangkalan operasi militer mereka. Meskipun hal ini punya tujuan untuk melindungi Arab Saudi, namun keputusan Qatar tersebut dinilai berlebihan oleh Arab Saudi sendiri. Karena sangat jelas terlihat bahwa Qatar mulai menginginkan hak otonomi yang lebih besar. Hal tersebut malah membuat ketegangan di antara kedua belah pihak. Ketegangan tersebut malah kian memuncak dengan terjadinya pertempuran di wilayah perbatasan antara Qatar dan Arab Saudi pada tanggal 30 September 1992 (Roberts, 2012). Pertempuran tersebut mengakibatkan tertembaknya tiga tentara Qatar (Cherkaoui, 2014) di sekitar wilayah perbatasan – yang masih menjadi sengketa – antara Qatar dan Arab Saudi pada tahun 1992 (Press, 1992). Kejadian tersebut direspons oleh pihak Qatar dengan pembatalan kesepakatan 1965 mengenai garis perbatasan wilayah antara Qatar dan Arab Saudi. Setelah pertempuran yang cukup menggambarkan posisi baru Qatar terhadap Arab Saudi, ada proses untuk mengesahkan batas-batas wilayah dua negara tersebut yang berjalan bahkan hingga tiga tahun (Al-Jazeera, 2017). Proses tersebut kemudian menghasilkan penandatanganan perjanjian terkait batas-batas wilayah perbatasan Qatar dan Arab Saudi, pada tahun 1996. Namun perjanjian ini tidak berarti apa-apa, alias persengketaan masih terus terjadi hingga beberapa tahun berikutnya. Sedikit mundur pada tahun 1994, di mana saat itu telah

terjadi perang sipil di Yaman, Arab Saudi dan Qatar terlihat tidak dalam satu kubu melainkan saling mendukung kubu yang berlawanan. Arab Saudi dan koalisinya di GCC – kecuali Qatar – mendukung separatis yang ingin membuat Yaman Selatan kembali. Sedangkan di sisi lain, Qatar berbeda dengan ‘saudara-saudaranya’ yaitu dengan mendukung Ali Abdullah Saleh dari Yaman Utara (Al-Muslimi, 2016).

Keputusan-keputusan dalam kebijakan luar negeri Qatar sejak menjelang tahun 1990an cukup membuktikan bahwa Qatar semakin ingin independen dan lepas dari bayang-bayang Arab Saudi. Terlebih ketika pada tahun 1996, setahun setelah kudeta tak berdarah Sheikh Emir Hamad terhadap ayahnya, Qatar mendirikan sebuah organisasi media berita, Al Jazeera. Media berita kontroversial yang memecahkan kultur tradisionalisme media berita atau pers sebagai lidah pemerintah dan atau manifestasi dari kepentingan pemerintah. Hal tersebut membuktikan langkah Qatar yang semakin jauh dan hal ini menambah gesekan antara Arab Saudi dan juga Qatar. Hingga tahun 2002, Arab Saudi memanggil duta besarnya untuk pulang ke Arab Saudi karena menilai bahwa Al Jazeera telah menyerang Keluarga Kerajaan Arab Saudi. Hal ini terjadi ketika Al Jazeera menayangkan program bincang-bincang *The Opposite Direction* yang membahas terkait kebijakan luar negeri Arab Saudi. Acara tersebut dikecam oleh Keluarga Kerajaan Arab Saudi karena dinilai menjelek-jelekkkan nama baik Keluarga Kerajaan, hingga berbuntut penarikan duta besar Saudi dari Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini berjalan selama enam tahun. Pada tahun 2007, bulan September, hubungan ini pulih ketika Qatar berkunjung ke keluarga kerajaan Saudi di Riyadh. Diikuti oleh kunjungan Raja Saudi Abdullah bin Abdulaziz ke Doha pada bulan Desember (Cafiero, 2012). Selama berjalannya waktu antara 2008-

2009, kedua negara ini saling berkunjung ke ibu kota masing-masing untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang menyebabkan tensi di antara keduanya. Saat ingin menyelesaikan konflik ini, Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani mendampingi Sheikh Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani dalam kunjungan mendadak ke Riyadh pada September 2007. Hubungan dengan cepat membaik dalam kunjungan itu. Pada bulan Maret 2008, Putra Mahkota Arab Saudi melakukan kunjungan selama tiga hari ke Doha, Qatar, yang pertama sejak 2002. Ada banyak hal yang dibahas (Samuel-Azran, 2013), termasuk soal perbatasan wilayah, pada tahun 2008 akhirnya kedua negara mencapai kesepakatan final. Meski masih ada yang menjadi ganjalan yaitu terkait hubungan baik Qatar dengan Iran.

Tahun 2011, terjadi peristiwa *Arab Spring*, demonstrasi masal masyarakat di beberapa negara Timur Tengah. Peristiwa ini menjadi sulit untuk dinafikan sebagai sejarah Timur Tengah. Di Arab Saudi, meski ada demonstrasi yang terjadi, tetapi tidak membawa perubahan politik domestik yang signifikan. Berbeda dengan kasus *Arab Spring* seperti di Tunisia, Libya, Mesir, Bahrain, dan negara lainnya. *Arab Spring* tidak terjadi di Qatar, tetapi tidak bisa dipungkiri momen ini memperlihatkan gesekan lain antara Qatar dengan Arab Saudi.

Dalam beberapa kasus *Arab Spring* tampak keduanya berbeda. Misalnya ketika *Arab Spring* terjadi di Tunisia Arab Saudi mendukung partai yang mengusung Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Dukungan secara personal juga diberikan kepada Ben Ali yaitu berupa pemberian suaka kepada Ben Ali untuk tinggal di Arab Saudi pasca rezimnya digulingkan (Cherkaoui, 2014). Sedangkan

Qatar dalam hal ini jelas mendukung gerakan-gerakan revolusi, seperti mendukung partai *Ennahdha* yang merupakan partai pendukung revolusi di Tunisia. Semenjak partai ini memiliki kuasa di Tunisia, Qatar menjalani hubungan bilateral yang kian kuat bahkan saling mendukung.

Dalam kasus *Arab Spring* di Mesir, Arab Saudi mendukung rezim Hosni Mubarak dalam hal menghalangi revolusi di Mesir. Arab Saudi bahkan meminta Presiden Amerika Serikat, kala itu Barrack Obama, untuk tetap setia kepada Mubarak sampai akhir, bahkan jika pasukan Mesir yang dalam pimpinan Mubarak mulai membunuh demonstran yang tidak bersenjata (Cafiero, 2012). Namun Presiden Obama menolak, sehingga Arab Saudi tidak terima dengan hal tersebut bahkan menuduh Amerika Serikat meninggalkan salah satu sekutu strategis utama mereka di wilayah Timur Tengah, bahkan meminta Amerika Serikat untuk menyingkir dari permasalahan tersebut (Cherkaoui, 2014). Di sisi berseberangan, Qatar mendukung pihak-pihak yang menuntut jatuhnya rezim Mubarak. Terlebih dukungannya terhadap organisasi Islam yang revolusioner yaitu Ikhwanul Muslimin, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Arab Saudi bahkan kelompok yang membahayakan monarki Arab Saudi. Banyak yang menduga bahwa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dengan mendanai kelompok tersebut (Deli, 2017), meskipun pihak Qatar tidak membenarkannya. Namun hal yang bisa menjadi bukti hubungan baik antara Qatar dan Ikhwanul Muslimin ialah melalui hubungan baik pemimpin Qatar dengan individu-individu Ikhwanul Muslimin, seperti Yusuf Al-Qardhawi – seorang tokoh agama Islam yang dinaturalisasi sebagai warga Qatar dan menjadi pengisi acara permanen dalam program *Sharia and Life* di saluran Al Jazeera – dan juga Khairat Al-Shater. Pimpinan Qatar pernah

beberapa kali bertemu secara pribadi dengan Shater beberapa bulan setelah tumbangannya rezim Hosni Mubarak, yaitu ketika bulan Maret 2011. Shater adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang tergabung dalam partai Kemerdekaan dan Keadilan, serta kandidat yang diusung oleh Ikhwanul Muslimin untuk naik menjadi presiden Mesir pada pemilu 2012. Namun, ia terpaksa dicoret dari daftar bakal calon presiden dikarenakan memiliki catatan kriminal sehingga ia digantikan oleh Mohammad Morsi yang merupakan ketua dari Partai Kemerdekaan dan Keadilan. Kala itu, Mohammad Morsi memang sengaja dijadikan sebagai cadangan untuk berjaga-jaga jikalau berkas Shater tidak diterima untuk pencalonannya (Pitakasari, 2012). Keluarga Kerajaan Arab Saudi memiliki pandangan buruk terhadap Ikhwanul Muslimin. Mereka memandang modus politik yang demokratis ala Ikhwanul Muslimin tersebut secara eksplisit merupakan sebuah ancaman terhadap sistem monarki autokrasi milik Arab Saudi. Seorang sarjana senior di Woodrow Wilson Center, David Ottoway, mengungkapkan bahwa di Arab Saudi tidak ada partai politik, tidak ada serikat buruh, dan sangat sedikit masyarakat sipil. Tapi di Mesir, justru kebalikannya. Mesir memiliki banyak partai politik, serikat buruh, dan masyarakat sipil. Ikhwanul Muslimin menerima kenyataan kondisi sosial politik di Mesir – yang mana hal tersebut ditolak oleh Arab Saudi untuk masyarakat mereka sendiri. Sehingga hal ini menjadi sebuah konflik antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin sendiri. Qatar dalam hal ini merupakan pendukung gerakan-gerakan revolusioner seperti milik Ikhwanul Muslimin (Cafiero, 2012). Namun tidak bisa juga dikesampingkan bahwa selama peristiwa *Arab Spring* tersebut, Arab Saudi dan Qatar memiliki musuh bersama. Misalnya dalam kasus *Arab Spring* di Libya dan Suriah. Keduanya sama-sama mendukung gerakan revolusioner di kedua negara

tersebut. Untuk Arab Saudi sendiri memang sudah bermusuhan lama dengan Libya dan Suriah. Sedangkan Qatar memang menyesuaikan posisinya sebagai pro revolusi.

Konflik kedua negara bertetangga, Qatar dan Arab Saudi, lainnya dan tak kalah mencuri perhatian ialah pada Maret 2014, ketika Arab Saudi (bersama dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab) menanggukkan hubungan dengan Qatar lagi. Kali ini alasannya ialah Qatar tidak menjalankan komitmennya untuk menepati perjanjian yang telah mereka buat, yang dinamakan Riyadh Agreement. Namun pemutusan ini hanya berjalan sekitar delapan bulan. November 2014, Arab Saudi sepakat untuk mengembalikan duta besarnya ke Qatar. Hal ini terjadi setelah Qatar menandatangani pembaharuan dari perjanjian tersebut. 2015-2016, hubungan Arab Saudi dan Qatar masih terbilang aman. Hingga pada tahun 2017, Arab Saudi (bersama negara GCC lain dan negara-negara di luar teluk lainnya), memutuskan kembali hubungan diplomatik dengan Qatar. Kali ini bahkan menutup akses darat dan laut bagi Qatar. Peristiwa ini seolah hendak mengasingkan Qatar dari dunia internasional. Hal ini yang kemudian disebut sebagai krisis diplomatik Qatar 2017.

B. Krisis Diplomatik Arab Saudi – Qatar 2017

Ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar bisa dikatakan sudah dimulai sejak 20an tahun yang lalu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih juga terjadi. Ketegangan serius yang terbaru tahun 2017 ini menggambarkan bahwa ketegangan itu masih ada meski kedua belah pihak telah bolak-balik membuat pemulihan hubungan diplomatik. Ketegangan Qatar dan Arab Saudi tahun 2017 ini terjadi dimulai ketika Sheikh Emir Tamim bin Hamad Al Thani, presiden Qatar yang

terbaru, mengatakan Iran adalah “kekuatan Islam”. Pernyataan Sheikh Emir Tamim juga menyerang Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa Presiden Trump, sedang mengalami persoalan hukum di negara asalnya karena klaim atas hubungannya dengan Rusia. Pernyataan ini muncul ke publik dua hari setelah pertemuan Presiden Trump dengan pemimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah di Riyadh, 20 May 2017 (Chughtai, 2018). Tidak hanya itu, Sheikh Tamim bahkan juga menyebut bahwa menjalin hubungan dengan Israel adalah baik (Al-Arabiya, 2017). Pernyataan ini muncul di *news bulletin* televisi Qatar yang kemudian ditulis ulang di situs resmi Al Jazeera News Channel (Al Jazeera versi Arab) dan situs resmi berita Qatar, Qatar News Agency. Sebagai respons terhadap berita tersebut Arab Saudi memutuskan untuk memblokir situs Al Jazeera dan situs Qatar News Agency dari negaranya pada 24 Mei 2017. Tindakan ini juga dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada hari yang sama. Namun beberapa jam setelah itu, pemerintah Qatar mengatakan bahwa situs beritanya sudah diretas. Situs berita milik Arab Saudi, *Al Arabiya*, membuat bukti-bukti bahwa situs Qatar tidak diretas (Al-Arabiya, 2017).

Kemudian setelah Arab Saudi, dan beberapa negara teluk lain, memblokir situs Al Jazeera dan situs berita resmi Qatar News Agency, pada 5 Juni dini hari 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keputusan ini juga dilakukan oleh Mesir, Bahrain, Yaman, Libya (faksi yang dipimpin oleh Khalifa Haftar), dan Uni Emirat Arab. Pada hari yang sama ini banyak hal terjadi kepada Qatar. Di hari yang sama, maskapai penerbangan milik Arab Saudi membatalkan penerbangan ke Doha, Qatar. Maskapai yang di kenal dengan nama Saudia ini mengunggah pernyataannya di Twitter bahwa

mereka akan menghentikan penerbangan ke Qatar mulai esok paginya, tanpa menjelaskan lebih lanjut lagi. Bahkan Arab Saudi juga melarang penerbangan yang transit di Arab Saudi dari dan ke Qatar. Masih di hari yang sama, Otoritas Transportasi Saudi mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan penutupan perbatasan langsung dengan Qatar yang melalui darat juga laut. Bahkan Arab Saudi memberikan waktu selama 14 hari kepada warga negaranya di Qatar untuk segera meninggalkan Qatar. Keputusan Arab Saudi ini sebagai langkah tegas terhadap Qatar atas keterlibatannya dengan gerakan-gerakan separatis dan teroris. Tidak hanya itu, beberapa maskapai penerbangan milik Uni Emirat Arab (FlyDubai dan Emirates) juga telah membatalkan penerbangan ke Qatar. Mesir juga melakukan pemblokiran jalur udara dan laut bagi Qatar. (Al-Jazeera, 2017).

Akibat dari pemutusan hubungan diplomatik ini Qatar seolah benar-benar terisolasi dari dunia luar. Qatar bergantung pada impor melalui darat dan laut untuk segala kebutuhan dasar penduduknya yang sebesar 2,7 juta jiwa, dan sekitar 40% makanannya masuk melalui perbatasan darat dengan Arab Saudi (BBC, 2017). Mengetahui adanya pemutusan hubungan diplomatik dan penutupan jalur impor barang-barang kebutuhan oleh Arab Saudi, warga Qatar memenuhi supermarket di Qatar untuk menyiapkan stok kebutuhan pangan mereka karena khawatir mereka kehabisan pangan selama pemutusan hubungan diplomatik terjadi (Bondarenko, 2017). Hampir semua rak-rak di supermarket Doha telah dikosongkan oleh warga Qatar yang khawatir akan dampak kekurangan kebutuhan dasar mereka (BBC, 2017). Selain itu, krisis diplomatik Qatar ini mengakibatkan warga negara Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang berada di Qatar harus pergi

meninggalkan Qatar. Bahkan warga negara Qatar dilarang untuk masuk ke negara mereka (Kabbani, 2017).

Pada 23 Juni 2017 empat negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar telah mengirimkan daftar 13 tuntutan sebagai jalan untuk memperbaiki hubungan renggang mereka. Daftar tuntutan itu disusun oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain, yang dikirimkan melalui perantara Kuwait sebagai mediator kedua pihak dalam konflik tersebut. Negara-negara tersebut memberikan waktu selama 10 hari untuk Qatar memenuhi tuntutan itu, terhitung dari hari dikirimnya daftar tersebut ke Qatar (Maclean, 2017). Isi dari daftar 13 perjanjian itu ialah (Al-Jazeera, 2017):

- 1) Menurunkan skala hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Iran's Revolutionary Guard dan intelijen yang berhubungan dengan Iran. Perdagangan dan perniagaan dengan Iran harus mematuhi sanksi dari Amerika Serikat dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan GCC.
- 2) Segera menutup pangkalan militer Turki, yang saat ini sedang dibangun, dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki di dalam Qatar.
- 3) Memutuskan hubungan dengan semua "organisasi teroris, sektarian, dan ideologis," khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIL, Al-Qaeda, Fateh Al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra), dan Hizbullah Lebanon. Secara resmi menyatakan entitas ini sebagai

kelompok teror sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, serta setuju dengan pembaharuan masa depan dari daftar ini.

- 4) Hentikan semua bentuk pendanaan untuk individu, kelompok, atau bahkan organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.
- 5) Menyerahkan “tokoh-tokoh teroris”, buron, dan orang-orang yang dicari dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain ke negara asal mereka. Bekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diperlukan tentang tempat tinggal, aktivitas, dan keuangan mereka.
- 6) Menutup dan menghentikan Al Jazeera dan stasiun afiliasinya.
- 7) Mengakhiri campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat. Berhenti memberikan kewarganegaraan kepada warga negara yang dicari dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain. Cabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara di mana kewarganegaraan tersebut melanggar hukum negara-negara tersebut.
- 8) Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan ditentukan dalam koordinasi dengan Qatar.
- 9) Menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial, dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk Arab dan negara Arab lainnya, serta

pada masalah ekonomi, sesuai Riyadh Agreement 2013/2014 yang dicapai dengan Arab Saudi.

- 10) Hentikan berhubungan dengan oposisi politik di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain. Serahkan berkas yang merinci hubungan dan dukungan Qatar sebelumnya dengan grup oposisi, dan kirimkan detail informasi pribadi mereka dan bentuk dukungan yang diberikan Qatar kepada mereka.
- 11) Menghentikan semua saluran berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen, Middle East Eye, dan lain-lain.
- 12) Setuju dengan semua tuntutan dalam waktu 10 hari dari daftar yang diajukan ke Qatar, atau daftar tersebut akan menjadi tidak valid.
- 13) Persetujuan untuk audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, diikuti oleh audit triwulan pada tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya.

Setelah pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar pada 5 Juni 2017, Qatar pun kemudian berkomentar terhadap hal tersebut. Kementerian Luar Negeri Qatar menanggapi dengan mengatakan bahwa “tidak ada pembenaran yang sah” atas tindakan yang diambil keempat negara yang memutuskan hubungan dengan Qatar. Ia menambahkan bahwa keputusan itu merupakan “pelanggaran terhadap kedaulatannya” dan bahwa itu tidak akan memengaruhi warga dan penduduk Qatar. Qatar telah berulang kali menolak tuduhan yang dilontarkan kepadanya sebagai tuduhan yang “tidak berdasar”. Baik emir Qatar dan menteri luar negeri negara itu telah menegaskan kembali bahwa Qatar bersedia untuk bernegosiasi dengan

negara-negara yang telah memboikotnya, dan telah menyambut panggilan dari para pemimpin internasional untuk berdialog (Chughtai, 2018). Terkait dengan 13 permintaan dari Arab Saudi dan pendukungnya dalam pemutusan hubungan dengan Qatar, Qatar merespons dengan mengatakan bahwa tuntutan tersebut “tidak masuk akal” dan “tidak dapat ditindaklanjuti”. Hal ini disampaikan oleh Qatar pada 23 Juni beberapa jam setelah Arab Saudi dan negara-negara pendukungnya menyatakan telah mengirim 13 tuntutan kepada Qatar. Direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar, Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani, mengatakan bahwa daftar tuntutan yang diberikan Arab Saudi dan negara pendukungnya ialah sebuah blokade ilegal yang tidak ada hubungannya dengan memerangi terorisme, malah dinilai sebagai sebuah usaha untuk “membatasi kedaulatan Qatar dan mengalihdayakan kebijakan luar negeri” Qatar (Al-Jazeera, 2017). Pada tanggal 29 Juni 2017, di hari terakhir perjalanan ke Amerika Serikat, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menteri luar negeri Qatar, berbicara soal krisis diplomatik yang dirasakan Qatar. Beliau mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan Arab Saudi ialah “upaya untuk melemahkan kedaulatan” Qatar (Al-Jazeera, 2018). Sehingga dalam hal ini Qatar jelas menolak apa yang diajukan sebagai tuntutan oleh Arab Saudi bersama Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir.